

Analisis Pengaruh Akuntabilitas Dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Jember

Analysis of Accountability and Transparency of Financial Management on Local Government Jember

Natak Riswanto
Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Jember (UNEJ)
Jln. Kalimantan 37, Jember 68121
E-mail: natakriswanto25@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah terhadap Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Jember. Objek dalam penelitian adalah kinerja pemerintah daerah Kabupaten Jember. Instrumen dalam penelitian ini adalah kuesioner yang disebarkan langsung kepada responden. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Uji Kualitas Data, Uji Asumsi Klasik, dan Uji Hipotesis yang terdiri dari Analisis Regresi Linier Berganda, Uji t, Uji F, serta Koefisien Determinasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah berpengaruh positif terhadap Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Jember semakin baik.

Kata Kunci: Akuntabilitas, Transparansi, Pengelolaan Keuangan Daerah Kinerja Pemerintah Daerah.

Abstract

This study aims to determine the effect of Accountability and Transparency of Financial Management for Local Government Performance Jember. The object of this research is Jember local government performance. Instrument in this study is a questionnaire distributed directly to the respondents. Methods of data analysis used in this study is Data Quality Test, Test Classical Assumptions and Hypothesis Testing consisted of Regression Analysis, t test, F test, as well as the Coefficient of Determination. The results showed that the Accountability and Transparency of Financial Management has positive influence on performance Jember regency administration is getting better.

Keywords: Accountability, Transparency, Financial Management, Performance of local government.

Pendahuluan

Pemerintah Daerah merupakan sistem penyelenggaraan pemerintahan yang merujuk pada otoritas administratif dan pelayanan di suatu daerah yang lebih kecil dari sebuah negara dimana negara Indonesia merupakan sebuah negara yang wilayahnya terbagi atas daerah-daerah Provinsi, daerah Kabupaten dan daerah Kota. Setiap daerah provinsi, daerah kabupaten dan daerah kota mempunyai pemerintahan daerah yang diatur dengan undang-undang.

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, Pemerintah daerah merupakan kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. Pada prinsipnya dalam Undang-Undang tersebut mengubah sistem penyelenggaraan pemerintah daerah sehingga pemerintah daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat

dengan meningkatkan pemberdayaan, peran masyarakat dan layanan publik untuk masyarakat.

Wiranto (2012) dalam Auditya dan Lismawati (2013) mengatakan bahwa *Good Governance* dapat dipahami sebagai implementasi otoritas politik, ekonomi, dan administratif dalam proses manajemen berbagai urusan publik dalam suatu negara. *Good Governance* memiliki beberapa indikator seperti efektif, partisipatif, transparan, akuntabel, produktif dan sejajar serta mampu mempromosikan penegakan hukum. Dengan adanya akuntabilitas publik dan transparansi pengelolaan keuangan pemerintah mendapat kepercayaan dan dukungan dari berbagai pihak dan pemerintah akan bekerja lebih serius dan disiplin.

Akuntabilitas adalah suatu konsep terkait dengan mekanisme pertanggungjawaban dari satu pihak ke pihak yang lain. Menurut sulistyorini dalam Sopanah (2005) pemerintah yang

accountable memiliki ciri-ciri (1) mampu menyajikan informasi penyelenggaraan pemerintah secara terbuka, cepat dan tepat kepada masyarakat, (2) mampu memberikan pelayanan yang memuaskan bagi publik, (3) mampu memberikan ruang bagi masyarakat untuk terlibat dalam proses pembangunan dan pemerintahan, (4) mampu menjelaskan dan mempertanggungjawabkan setiap kebijakan publik secara proposional dan (5) adanya sarana publik untuk menilai derajat pencapaian pelaksanaan program dan kegiatan pemerintah. Proses perencanaan dan pelaksanaan anggaran lebih partisipatif dan mekanisme pengawasan baik internal ataupun eksternal terhindar dari praktek KKN. Selain itu, dengan ditingkatnya akuntabilitas publik dan transparansi akan mewujudkan *good corporate governance* yang semakin baik dari tahun ketahun (Rofiqoh, 2006).

Prinsip akuntabilitas ini sudah banyak diterapkan di sektor publik guna untuk mewujudkan tata kelola yang baik. Ruang lingkup akuntabilitas tidak saja pada bidang keuangan, tetapi meliputi akuntabilitas keuangan, akuntabilitas hukum, akuntabilitas program, akuntabilitas proses dan akuntabilitas hasil. Selain itu akuntabilitas tidak saja menyangkut proses, kinerja dan manajemen, akan tetapi juga menyangkut pengelolaan keuangan dan kualitas output. Akuntabilitas keuangan dapat diukur dari semakin kecilnya penyimpangan dalam pengelolaan keuangan pemerintah.

Prinsip transparansi memiliki dua aspek dalam mewujudkan pemerintah yang terbuka akan informasi-informasi mengenai kebijakan yang dijalankan oleh pemerintah daerah, yaitu komunikasi publik oleh pemerintah dan hak masyarakat terhadap akses informasi. Keduanya akan sangat sulit dilakukan jika pemerintah tidak menangani kinerjanya dengan baik. Manajemen kinerja yang baik adalah titik awal dari transparansi. Transparansi harus seimbang dengan kebutuhan akan kerahasiaan lembaga maupun informasi-informasi yang mempengaruhi hak privasi individu. Pemerintah daerah seharusnya perlu menyiapkan kebijakan yang jelas tentang cara mendapatkan informasi (Krina, 2003).

Kinerja instansi pemerintah berkaitan erat dengan akuntabilitas dan transparansi. Penerapan berbagai aturan perundang-undangan yang ada terkait dengan penerapan konsep akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan diharapkan dapat mewujudkan pengelolaan pemerintah daerah yang baik dan berpihak kepada rakyat. Implementasi akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan daerah ini diharapkan mampu meningkatkan kinerja pemerintah daerah.

Pemerintah Daerah Kabupaten Jember sejatinya tidak dapat berjalan sendiri dalam mengemban tugasnya untuk mengembangkan daerahnya serta mewujudkan cita-cita bangsa yakni keadilan sosial dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagai mitra sejajar Pemerintah Daerah yang melaksanakan fungsi-fungsi pemerintahan daerah. Peran DPRD sendiri dalam pemerintahan daerah juga sangat penting, dimana DPRD ini menjalankan fungsinya sebagai mitra sekaligus pengawas dari kinerja Pemerintah Daerah. Sebagai contoh peran DPRD dalam pemerintahan yakni seperti yang tertuang

dalam Undang-undang No. 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, dan DPRD yakni DPRD bertugas untuk melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan daerah dan anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten. Ini membuktikan bahwa DPRD sejatinya juga memiliki fungsi pengawasan dalam penetapan keputusan dan kebijakan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah.

Pengawasan kinerja tidak bisa hanya ditentukan dalam tenggang waktu yang singkat, atau dalam pengawasannya hanya disimpulkan kinerja pada satu periode saja. Namun harus berkala dan berkelanjutan agar mengetahui apakah kinerja yang diukur mengalami progres atau bahkan bisa jadi mengalami penurunan, apalagi kabupaten Jember sudah 2 periode dipimpin oleh Kepala Daerah yang sama, di akhir masa jabatan Kepala Daerah ini pengawasan kinerja yang dilakukan oleh DPRD terkait transparansi dan akuntabilitas pemerintah daerah sangatlah penting untuk melihat perkembangan kinerja pemerintah daerah dari awal masa jabatannya hingga saat ini.

Penelitian ini memiliki 2 hipotesis. Hipotesis pertama menyatakan bahwa Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah berpengaruh signifikan terhadap kinerja pemerintah daerah. Hipotesis kedua menyatakan bahwa Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah berpengaruh signifikan terhadap kinerja pemerintah daerah. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh dari akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan daerah terhadap kinerja pemerintah daerah.

Metode Penelitian

Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian adalah data primer. Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumber aslinya tidak melalui media perantara (Indrianto dan Supomo, 2009). Data primer diperoleh melalui pemberian kuesioner kepada responden yang dalam hal ini yaitu anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) yang ada di Kabupaten Jember.

Populasi dan Sampel Penelitian

Populasi adalah sekelompok orang, kejadian atau segala sesuatu yang mempunyai karakteristik tertentu. Sampel adalah sejumlah responden yang diambil dari populasi yang karakteristiknya hendak diselidiki dan dianggap bisa mewakili keseluruhan populasi. Pengambilan sampel ini harus dilakukan sedemikian rupa sehingga diperoleh sampel yang benar-benar dapat berfungsi sebagai contoh, atau dapat menggambarkan keadaan populasi yang sebenarnya (Indrianto dan Supomo, 2009:115). Penelitian ini menggunakan metode sensus, dimana populasi penelitian adalah seluruh Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jember periode 2014-2019 yang berjumlah 50 anggota.

Metode Analisis Data

Metode analisis yang digunakan adalah analisis deskriptif statistik, uji kualitas data yaitu uji validitas dan uji reliabilitas, uji asumsi klasik yaitu uji normalitas, uji multikolinieritas dan uji heteroskedastisitas, dan uji hipotesis yaitu analisis regresi linear berganda, uji F, uji T dan koefisien determinasi.

Hasil Penelitian

Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif digunakan untuk memberikan gambaran mengenai karakter sampel dalam penelitian serta memberikan deskripsi variabel yang digunakan dalam penelitian ini.

Tabel 1. Statistik Deskriptif

Keterangan	N	Min	Max	Mean	Std. Deviation
X1	47	1,67	3,80	2,6493	0,50518
X2	47	1,36	3,61	2,7773	0,47809
Y	47	1,46	3,78	2,8237	0,54756
Valid N					

Sumber : Data diolah 215

Dari tabel diatas menunjukkan hasil statistik dari data-data yang diperoleh dari kuesioner yang disebarakan pada anggota DPRD Kabupaten Jember sebagai responden penelitian, dapat dilihat bahwa nilai pada variabel akuntabilitas dari 47 kuesioner yang telah diolah sebagai sampel memiliki nilai terendah sebesar 1,67 sedangkan nilai tertinggi sebesar 3,80 dan nilai rata-rata yang diperoleh sebesar 2,6493 dengan standar deviasi sebesar 0,50518. Pada variabel transparansi memiliki nilai terendah sebesar 1,36 sedangkan nilai tertinggi sebesar 3,61 dan nilai rata-rata yang diperoleh sebesar 2,7773 dengan standar deviasi sebesar 0,47809. Kemudian pada tabel kinerja pemerintah daerah memiliki nilai terendah 1,46 sedangkan nilai tertinggi sebesar 3,78 dan nilai rata-rata sebesar 2,8237 dengan standar deviasi sebesar 0,54756.

Uji Kualitas Data

Uji Validitas

Uji validitas sebagai alat ukur dalam penelitian ini, yaitu menggunakan korelasi *product moment pearson's*, yaitu dengan cara mengkorelasikan tiap pertanyaan dengan skor total, kemudian hasil korelasi tersebut dibandingkan dengan angka kritis taraf signifikansi 5% (Prayitno, 2010:90). Hasil uji validitas untuk indikator Variabel Budaya Organisasi.

Tabel 2. Hasil Uji Validitas Data

Variabel	Pearson Corelation	sign	Kesimpulan
X1.1	0,554	0,000	Valid
X1.2	0,632	0,000	Valid
X1.3	0,651	0,000	Valid
X1.4	0,621	0,000	Valid
X1.5	0,702	0,000	Valid
X2.1	0,518	0,000	Valid
X2.2	0,363	0,012	Valid
X2.3	0,508	0,000	Valid
X2.4	0,643	0,000	Valid
X2.5	0,667	0,000	Valid
Y1	0,594	0,000	Valid
Y2	0,572	0,000	Valid
Y3	0,538	0,000	Valid
Y4	0,594	0,000	Valid
Y5	0,657	0,000	Valid
Y6	0,756	0,000	Valid
Y7	0,585	0,000	Valid

Sumber : Data diolah 215

Dari Tabel 2 diketahui bahwa masing-masing indikator (item) dalam variabel yang digunakan mempunyai hasil nilai *product moment pearson's* dengan signifikansi 0,000 – 0,012 < 0,05, sehingga indikator (item) yang digunakan dalam variabel penelitian ini dapat dinyatakan sesuai atau relevan dan dapat digunakan sebagai item dalam pengumpulan data.

Uji Reliabilitas

Tabel 3. Reliabilitas data Masing-masing Variabel

Variabel	Cronbach's Alpha	Cutt Off	N Off Item	Keterangan
X1	0,628	>0,6	5	Reliabel
X2	0,608	>0,6	5	Reliabel
Y	0,742	>0,6	7	Reliabel

Sumber: data yang diolah 2015

Uji Asumsi Klasik

Uji Normalitas

Uji normalitas data dilakukan untuk mengetahui apakah data yang diperoleh berdistribusi normal atau tidak. Uji normalitas yang dilakukan terhadap sampel dilakukan dengan menggunakan *kolmogorov-smirnov test* dengan menetapkan derajat keyakinan (α) sebesar 5% (Prayitno, 2010:71). Hasil pengujian dapat disajikan berikut ini:

Tabel 4. Uji Normalitas

Test of Normality	Kolmogorov-Smirnov		
	Sign	Cutt Off	Keterangan
X1	0,193	>0,05	Normal
X2	0,378	>0,05	Normal
Y	0,449	>0,05	Normal

Sumber: data yang diolah 2015

Ketentuan yang digunakan dapat diketahui bahwa nilai probabilitas atau signifikansi untuk masing-masing variabel, yaitu 0,193, 0,378, dan 0,449 > 0,05, sehingga dapat dinyatakan bahwa data dalam penelitian ini berdistribusi normal. Sehingga model regresi yang digunakan telah memenuhi. Hal ini menunjukkan bahwa model regresi dalam penelitian ini layak digunakan karena telah memenuhi asumsi klasik normalitas residual.

Uji Multikolinearitas

Uji multikolonieritas digunakan untuk mengetahui ada atau tidaknya hubungan linear dalam variabel independen dalam model. Ada atau tidaknya multikolinearitas dapat dilihat dari nilai *Variance Inflation Factor* (VIF). Latan (2013:61), menyatakan bahwa indikasi multikolinearitas pada umumnya terjadi jika VIF lebih dari 10, maka variabel tersebut mempunyai persoalan multikolinieritas dengan variabel bebas lainnya.

Tabel 5. Uji Multikolinearitas

Test Of Multikolinearity	VIF	Cutt off	Keterangan
X1	1,149	< 10	Tidak terjadi multikolinearitas
X2	1,149	< 10	Tidak terjadi multikolinearitas

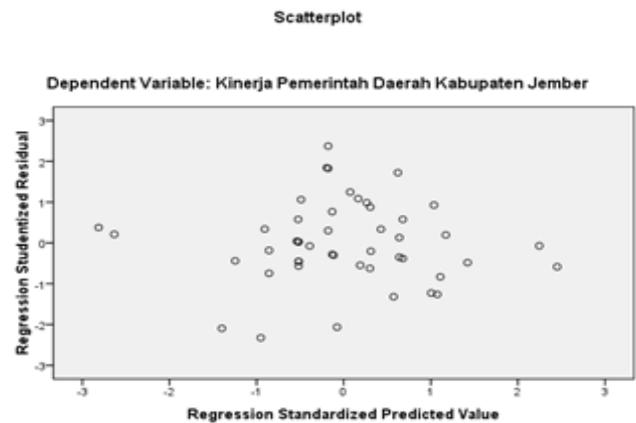
Sumber: data yang diolah 2015

Uji heterokedastis

Uji Heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam sebuah model regresi terjadi ketidaksamaan varian dari residual dari satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Cara memprediksi ada tidaknya heteroskedastisitas pada suatu model dapat dilihat dari pola gambar scatterplot model tersebut (Latan, 2013:39). Dasar pengambilan keputusan antara lain :

1. Jika ada pola tertentu. seperti titik-titik (point-point) yang ada membentuk suatu pola tertentu yang teratur (bergelombang, melebar kemudian menyempit), maka telah terjadi heteroskedastisitas;

2. Jika tidak ada pola yang jelas serta titik-titik menyebar diatas dan dibawah angka 0 pada sumbu Y, maka tidak terjadi heteroskedastisitas.



Sumber: data yang diolah 2015

Hasil analisis ini menunjukkan bahwa tidak adanya heteroskedastisitas, karena tebaran data tidak membentuk garis tertentu atau tidak terdapat pola yang jelas, serta titik-titik menyebar diatas dan dibawah angka nol pada sumbu Y

Uji Hipotesis

Analisis Regresi Linear Berganda

Analisis regresi berganda berkaitan dengan studi ketergantungan suatu variabel *dependen* pada satu atau lebih variabel *independen* dengan tujuan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh variabel *independen* terhadap variabel *dependen*. Hasil analisis regresi linear berganda antara variabel *independen* yaitu akuntabilitas, dan transparansi, serta variabel *dependen* yaitu kinerja pemerintah. Berdasarkan pengujian diperoleh hasil yang disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 6. Analisis Regresi Linier Berganda

Variabel Independent	Standardized Coefficients B	T	t _{test}	Sig.	a	Keterangan
(Constant)	0,543	-	-	-	-	-
Akuntabilitas (X ₁)	0,414	3,281	> 2,015	0,002	< 0,05	Signifikan
Transparansi (X ₂)	0,344	2,726	> 2,015	0,009	< 0,05	Signifikan
Adjusted R Square = 0,364				F Hitung = 14,160 Sig. F = 0,000		

Sumber: data yang diolah 2015

Berdasarkan koefisien regresi, maka persamaan regresi yang dapat dibentuk adalah sebagai berikut:

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + e$$

$$Y = 0,543 + 0,414X_1 + 0,344X_2$$

Keterangan:

Y = Kinerja Pemerintah Daerah

α = Konstanta

β = Koefisien Regresi

X1 = Akuntabilitas

X2 = Transparansi

e = Kesalahan Regresi (error)

R Square (R^2) menunjukkan sebesar 0,364 atau 36,4% dan sisanya 63,6% dipengaruhi atau dijelaskan oleh faktor-faktor lain yang tidak dimasukkan dalam model penelitian ini, seperti alokasi atau anggaran dana, ketepatan pengalokasian anggaran, kinerja pegawai Pemerintah Daerah dan lain sebagainya.

Pembahasan

Pengaruh Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah

Uji T

Pengujian ini dilakukan untuk mengetahui apakah variabel *independen* berpengaruh terhadap variabel *dependen* secara signifikan secara parsial. Tabel distribusi t dicari pada $\alpha = 5\%$, dengan derajat kebebasan (df) $n-1$ atau $47-1 = 46$. Hasil analisis regresi berganda adalah untuk mengetahui pengaruh akuntabilitas, dan transparansi terhadap variabel *dependen* yaitu kinerja pemerintah. Berdasarkan hasil analisis regresi linear berganda (dalam hal ini untuk menguji pengaruh secara parsial) diperoleh hasil yang dapat dinyatakan berikut:

1. Variabel akuntabilitas (X_1) memiliki nilai t 3,281 > 2,013 dan signifikansi $0,002 < 0,05$, maka H_0 ditolak dan H_a diterima, yang berarti secara parsial variabel akuntabilitas berpengaruh signifikan terhadap kinerja pemerintah Daerah Kabupaten Jember.
2. Variabel transparansi (X_2) memiliki nilai t 2,726 > 2,013 dan signifikansi $0,009 < 0,05$, maka H_0 ditolak dan H_a diterima, yang berarti secara parsial variabel transparansi berpengaruh signifikan terhadap kinerja pemerintah Daerah Kabupaten Jember.

Uji F

Uji F dimaksudkan untuk mengetahui pengaruh akuntabilitas, dan transparansi terhadap variabel *dependen* yaitu kinerja secara simultan. Tabel distribusi F dicari pada $\alpha = 5\%$, dengan derajat kebebasan (df) df_1 atau $3-1 = 2$, dan df_2 $n-k-1$ atau $47-2-1 = 44$. Berdasarkan hasil analisis regresi linear berganda (dalam hal ini untuk menguji pengaruh secara simultan) diperoleh hasil, yaitu bahwa $F_{hitung} > F_{tabel}$ ($14,160 > 3,21$) dan signifikansi ($0,000 < 0,05$), maka H_0 ditolak dan H_a diterima, artinya variabel akuntabilitas, dan transparansi secara simultan berpengaruh signifikan terhadap kinerja pemerintah Daerah Kabupaten Jember.

Koefisien Determinasi

Berfungsi untuk mengetahui besarnya proporsi atau sumbangan pengaruh variabel *independen* terhadap variabel *dependen* secara keseluruhan, maka dapat ditentukan dengan uji koefisien determinasi berganda (R^2). Dilihat dari nilai koefisien determinasi berganda, hasil analisis menunjukkan bahwa besarnya persentase sumbangan pengaruh variabel akuntabilitas, dan transparansi terhadap kinerja pemerintah Daerah Kabupaten Jember, dapat dilihat dari nilai *Adjusted*

Penelitian yang dilakukan, menunjukkan bahwa akuntabilitas memiliki pengaruh yang relatif kuat terhadap kinerja Pemerintah Daerah di Kabupaten Jember. Hal ini membuktikan bahwa akuntabilitas sebagai peraturan perundang-undangan yang ada di daerah dengan komitmen politik akan akuntabilitas maupun mekanisme pertanggungjawaban yang ada di daerah Jember, dengan terdapatnya mekanisme sistem yang jelas dalam mengatur mekanisme pertanggungjawaban instansi Pemerintahan Jember, adanya akomodasi terhadap kepentingan pihak-pihak yang terkait dengan instansi publik maupun pemerintahan yang di Jember, ketaatan terhadap peraturan dan ketentuan serta hukum dalam menjalankan tugas dan fungsi yang relatif sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan, lembaga atau instansi telah dinilai patuh terhadap peraturan, ketentuan dan hukum yang berlaku secara umum dan khusus, dan pelaksanaan dan pertanggungjawaban kinerja diawasi secara rutin oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terhadap instansi pemerintahan yang ada di Kabupaten Jember, memberikan pencapaian target kinerja tiap-tiap kegiatan yang dihasilkan dalam suatu program kerja instansi yang ada lebih akurat sehingga ketepatan dan kesesuaian hasil dari suatu kegiatan dengan program kerja yang telah ditetapkan lebih sesuai dengan realisasi anggaran kerja yang telah ditetapkan.

Hasil penelitian ini sesuai dengan yang dilakukan oleh Lismawati (2013), Siringoringo (2009), Sari (2013), dan Asrida (2012), menyatakan bahwa ada pengaruh akuntabilitas terhadap kinerja pemerintah daerah, dengan meningkatnya akuntabilitas yang diselenggarakan oleh pihak terkait maka akan lebih mengoptimalkan pengawasan terhadap kinerja pemerintah yang sedang dianggarkan dan diselenggarakan.

Hasil penelitian ini sesuai dengan pendapat yang diajukan oleh Mardiasmo (2006), menyatakan bahwa pertanggungjawaban yang dilakukan oleh aparatur negara, menimbulkan persepsi aparatur terhadap kinerja layanan publik. Persepsi dari masing-masing aparatur digunakan sebagai acuan untuk menilai efektifitas dari kinerja yang dilakukan selama ini. Terlebih lagi tuntutan akuntabilitas membuat para aparatur negara lebih memfokuskan pelayanannya terhadap masyarakat. Fenomena yang terjadi dalam perkembangan sektor publik di Indonesia adalah menguatnya tuntutan akuntabilitas atas lembaga publik baik pusat maupun daerah. Akuntabilitas dapat diartikan sebagai dasar pelaporan keuangan yang didasari oleh adanya hak masyarakat untuk mengetahui dan

menerima penjelasan atas pengumpulan sumber daya dan penggunaannya.

Pengaruh Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah

Penelitian yang dilakukan, menunjukkan bahwa transparansi memiliki pengaruh yang relatif kuat terhadap kinerja Pemerintah Daerah di Kabupaten Jember. Hal ini membuktikan bahwa transparansi sebagai keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan dan keterbukaan dalam mengemukakan informasi material dan relevan mengenai organisasi atau instansi publik, dengan diselenggarakan pengungkapan atas segala transaksi program atau kebijakan yang dilakukan oleh instansi dan diawasi oleh pihak Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, terdapatnya pengungkapan tentang resiko-resiko yang dihadapi dalam penyelenggaraan kegiatan didalam instansi, aktivitas pengungkapan atas laporan keuangan tahunan dilakukan secara rutin oleh pihak instansi atau pemerintah daerah Jember, pengungkapan tentang struktur kepemimpinan dan perubahan-perubahan yang terjadi kepada pihak pemerintahan atau instansi yang dipublikasikan secara baik, dan kemudahan akses terhadap informasi yang diberikan kepada publik secara akurat, relevan dan tepat waktu, telah memberikan pengetahuan mengenai realisasi anggaran sesuai dengan anggaran yang telah ditetapkan dan pengetahuan terhadap hasil kegiatan terhadap kehidupan masyarakat yang ada di Jember, serta memberikan transparansi terhadap proses efisiensi operasional dalam pelaksanaan anggaran belanja dengan standar belanjanya.

Hasil penelitian ini sesuai dengan yang dilakukan oleh Lismawati (2013), Siringoringo (2009), Sari (2013), dan Asrida (2012), menyatakan bahwa ada pengaruh transparansi terhadap kinerja pemerintah daerah, dengan transparansi yang dilakukan secara baik dan memang benar transparan maka akan memberikan pengetahuan langsung kepada publik dan pengawasan yang lebih baik kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan kinerja pemerintah daerah secara khusus dan umum dapat meningkat sesuai kegiatan yang telah dilakukan dan diawasi.

Hasil penelitian ini sesuai dengan pendapat yang diajukan oleh Mardiasmo (2006), menyatakan bahwa dengan adanya transparansi, maka tuntutan masyarakat terhadap pengungkapan informasi yang dilakukan oleh aparatur negara menimbulkan persepsi dari masing-masing aparatur terkait dengan kinerja pemerintah daerah. Persepsi dari masing-masing aparatur negara pengungkapan yang dilakukan untuk memberikan pelayanan publik yang dapat diketahui oleh masyarakat. Terlebih lagi, dengan adanya transparansi diharapkan kualitas pelayanan publik semakin bertambah baik. Transparansi dibangun atas dasar kebebasan memperoleh informasi, informasi yang berkaitan dengan kepentingan publik secara langsung dapat diperoleh oleh masyarakat.

Kesimpulan dan Keterbatasan

Kesimpulan

Akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah berpengaruh signifikan terhadap kinerja pemerintah daerah di Kabupaten Jember; Hal ini membuktikan bahwa akutabilitas yang dilakukan secara baik, sesuai, dipertanggungjawabkan, dan diawasi dalam prosesnya maka akan meningkatkan kinerja pemerintah daerah.

Transparansi pengelolaan keuangan daerah berpengaruh signifikan terhadap kinerja pemerintah daerah di Kabupaten Jember. Hal ini membuktikan bahwa transparansi yang diinformasikan kepada publik dan Dewan Perwakilan Rakyat dengan benar, sesuai dan seksama maka akan meningkatkan kinerja pemerintah daerah.

Keterbatasan

Penelitian ini mempunyai lineancy bias yaitu adanya kecenderungan para responden untuk memberikan skor jawaban yang lebih tinggi terhadap skor jawaban yang sebenarnya terjadi sehingga responden tidak menjawab dengan benar ataupun yang mengisi kuisisioner bukan responden yang bersangkutan. Oleh karena itu, sebaiknya para responden diharapkan dapat ditunggu atau ditemani secara langsung dalam pengisian kuisisioner agar meminimalisir pengisian jawaban yang tidak sesuai dengan sebenarnya

Penelitian tidak melakukan wawancara secara langsung terhadap responden atau dengan menyebar kuisisioner kepada para responden karena keterbatasan waktu. Sehingga peneliti tidak dapat mengetahui secara langsung situasi dan kondisi responden saat mengisi kuisisioner, serta tidak terlibat secara langsung dengan aktivitas yang ada dalam instansi tersebut. Hal ini menyebabkan peneliti tidak mengetahui secara pasti apakah akuntabilitas dan transparansi yang diterapkan dalam instansi tersebut bukan merupakan jawaban yang semu. Oleh karena itu, pada penelitian diharapkan menyempatkan waktu dalam penyebaran kuisisioner dan dapat melakukan wawancara secara langsung. Sehingga peneliti dapat mengetahui secara langsung situasi dan kondisi responden saat mengisi kuisisioner, serta dapat terlibat secara langsung dengan aktivitas yang ada dalam instansi tersebut.

Daftar Pustaka

- Auditya, Lucy dan Lismawati, Husaini. 2013. *Analisis Pengaruh Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah*. Jurnal. Universitas Bengkulu..
- Asrida. 2012. *Pengaruh Penerapan Prinsip Akuntabilitas dan Transparansi Keuangan Terhadap Kinerja Penyusunan Anggaran Pada Pemerintah Kabupaten Bireuen*. Jurnal Kebangsaan. Vol 1 No 1
- Boy, Deny. Siringoringo, Hotniar. 2009. *Analisis Pengaruh Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Anggaran Pendapatan Belanja Sekolah Terhadap Partisipasi Orang Tua Murid*. Jurnal Ekonomi Bisnis. No 12 Vol 14.
- Indrianto, N., Supomo. 2009. *Metodologi Penelitian Bisnis : Untuk Akuntasi dan Manajemen*. Yogyakarta: BPF.

Krina, Loina Lalolo. 2003. Indikator dan Alat ukurr Prinsip Akuntabilitas, Transparansi dan Partisipasi : Sekretariat Good Publik governance, BAPPENAS. Jakarta.

Latan, Hengky. 2013. *Analisis Multivariat Teknik dan Aplikasi*. Bandung: Alfabeta

Mardiasmo. 2006. *Perwujudan Transparansi dan Akuntabilitas Publik Melalui Akuntansi Sektor Publik: Suatu Saran Good Governance*. Jurnal Akuntansi Pemerintahan. Vol 2 No. 1.

Prayitno, D. 2010. *Paham Analisa Data Statistik Dengan SPSS*. Yogyakarta: MediaKom.

Rofiqoh, Nurul. 2006. *Mewujudkan Good Local Governance Melalui Transparansi dan Akuntabilitas Anggaran Publik*. Vol 10. No. 1

Sari, Deasy Dwi purnama. 2013. *Analisis Pengaruh Persepsi Transparansi dan Akuntabilitas Terhadap Kinerja Layanan Publik Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Banyuwangi*. Skripsi Universitas Jember.

Sopanah. 2005. *Pengaruh Akuntabilitas Publik, Partisipasi Masyarakat, Transparansi Kebijakan Publik Terhadap Hubungan Antara Pengetahuan Anggran Daerah dengan Pengawasan Keuangan Daerah (APBD)*. Jurnal Logos. Vol 3 No. 1

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.

